

jurnal Inquiry- Identifikasi Gelandangan dan Pengemis

by Noviyanti Kartika Dewi

Submission date: 16-Feb-2021 07:32PM (UTC+0700)

Submission ID: 1510682835

File name: 7._jurnal_Inquiry-_Identifikasi_Gelandangan_dan_Pengemis.pdf (727.88K)

Word count: 4743

Character count: 30046

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI UPT REHABILITASI SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Tyas Martika Anggriana

tyas.ma@gmail.com

Noviyanti Kartika Dewi

Email: tiie_k@yahoo.co.id

Fakultas Ilmu Pendidikan, IKIP PGRI Madiun

Abstrak: Gepeng (gelandangan dan pengemis) merupakan suatu fenomena sosial yang harus ditanggapi dengan serius. Fenomena ini semakin lama semakin memprihatinkan. Meskipun pemerintah selalu berusaha untuk mengurangi populasi gepeng melalui operasi penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja maupun Polisi, namun tetap saja jumlah gepeng seperti tidak pernah berkurang bahkan cenderung bertambah. Mudah-mudahan mencari uang di kota besar seperti Jakarta dan kota besar lainnya telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang dari luar daerah tanpa membawa bekal keterampilan dan pendidikan yang memadai untuk mengadu nasib. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan permasalahan yang terjadi pada Gelandangan dan Pengemis. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada terkait dengan permasalahan pada Gelandangan dan Pengemis di kota Madiun. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam dari informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif. Penelitian ini dilakukan selama satu tahun di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Kota Madiun. Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah terdapat beberapa pokok permasalahan yang dialami oleh para gelandangan dan pengemis yang ada di Madiun serta sumber masalah yang dialami oleh warga binaan berkaitan dengan mental yang tidak sehat, yaitu adanya sikap malas dan tidak mau berusaha untuk mengubah hidup menjadi lebih baik, menginginkan sesuatu yang instan dan kemampuan resiliensi yang rendah.

Kata Kunci : Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)

Abstract: Vagrants and beggars is a social phenomenon that should be taken seriously. Although the government is always trying to reduce the population through enforcement operation conducted by Civil Service Police Unit and the Police, but the numbers like never diminished even tends to increase. Looking for easy money in the city has become an attraction for the venture for immigrants without adequate skills and education. This study aims to describe the problems that occur on the Vagrants and Beggars. This research was conducted through qualitative descriptive study aimed to describe the phenomenon that is associated with problems the Vagrants and Beggars in Madiun. Data collection techniques used were documentation, observation and in-depth interviews of informants. Data analysis technique used is an interactive model analysis. This study was conducted for a year in the Social Rehabilitation Unit Vagrants and Beggars Madiun. Conclusions based on the results of research that has been done is that there are some problems faced by the homeless and beggars in Madiun. Source of the problem associated with mental unhealthy, that is their lazy attitude and do not want to try to change lives for the better, and want everything in an instant way.

Keyword: Vagrants and Beggars

PENDAHULUAN

Fenomena yang sering dijumpai di lingkungan sekitar adalah banyaknya gelandangan, pengemis, maupun pekerja anak yang berkumpul di fasilitas-fasilitas umum, *traffic light* bahkan masuk di wilayah kampus dan pemukiman warga. Mudah-mudahan mencari uang di kota besar seperti Jakarta dan kota besar lainnya telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang dari luar daerah tanpa membawa bekal keterampilan dan pendidikan yang memadai untuk mengadu nasib.

Berdasarkan PP No. 31 Tahun 1980 (<http://www.hukumonline.com>), gelandangan didefinisikan sebagai orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan hidup mengembara di tempat umum, sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di tempat umum dengan berbagai cara/alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Gepeng (gelandangan dan pengemis) merupakan suatu fenomena sosial yang harus ditanggapi dengan serius.

Berdasarkan data dari Pusat Data Informasi Kementerian Sosial yang mencatat dalam kurun 5 tahun terakhir jumlah gepeng meningkat sebanyak 17 persen (Wismoyojati, 2012). Penyebab banyaknya gelandangan dan pengemis di kota besar, bukan hanya karena sebagai korban dari tidak adanya lapangan pekerjaan, tetapi juga dari faktor tidak adanya keinginan untuk berusaha dan ketidakmemilikinya keterampilan (Tira, 2012).

Fenomena tentang gelandangan dan pengemis tidak hanya terjadi di kota besar. Di Madiun, dan wilayah sekitar Madiun seperti Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo juga memiliki masalah tentang gelandangan

dan pengemis. Hampir seluruh kawasan strategis kota menjadi lokasi mangkal pengemis dan pengamen.

Berdasarkan berita yang ditulis Taufiq (2005) dalam tempo.co diketahui bahwa pada tanggal 22 Desember 2005, 23 pengamen ditangkap oleh satuan polisi Pamong Praja, karena mengamen di jalan-jalan protokol. Penangkapan tersebut berbuntut 6 pengamen ditahan di Dinas Sosial Kota Madiun. Fenomena serupa masih terjadi pada tahun 2010. Kepala Satpol PP Kota Madiun (Wakoranews.com, 2010) menjelaskan bahwa Pemkot kelimpungan menghadapi rumitnya penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) serta anak jalanan (anjol). Meski razia sudah sering dilakukan Satpol PP, gepeng dan anjal masih banyak dijumpai. Jumlah terbesar gepeng dan anjal berasal dari kabupaten di sekitar Madiun. Sebaliknya, yang berasal dari Kota Madiun sendiri jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Karena itu, pihak eksekutif sengaja menyiapkan rancangan perubahan Perda Nomor 4/2006, tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Permasalahan tentang gelandangan dan pengemis tidak hanya berhenti sampai dengan tahun 2010. Terbukti pada tahun 2014, fenomena tersebut masih terjadi. Dituneik (2014) memaparkan berita sebagai berikut:

"Di Kota Madiun, petugas Satpol PP mengamankan belasan gelandangan dan pengemis (Gepeng) dari sejumlah titik di wilayah Kota Madiun. Dalam razia ini, sempat diwarnai aksi kejar-kejaran dengan gepeng yang berusaha melarikan diri saat akan dinaikkan ke truk Satpol PP. Kasi Trantib Satpol PP Kota Madiun, Sadeli mengatakan, razia ini dilakukan karena banyaknya gelandangan yang berkeliaran di Kota

Madiun. Sedikitnya ada 15 gelandangan yang datang dari berbagai daerah, diamankan dan di data petugas. Rata rata mereka berusia diatas 40 tahun. Kebanyakan wanita, dan dari luar wilayah. Selanjutnya para gelandangan ini didata dan dibawa ke panti rehabilitasi sosial”.

Fenomena gepeng juga terjadi di wilayah Kabupaten Magetan, yaitu sebuah kabupaten yang berada di wilayah sebelah barat Kota Madiun. Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Magetan sebagaimana dikutip oleh Radar Madiun (2014) menyampaikan bahwa lokasi mangkal para gelandangan dan pengemis diantaranya adalah di perempatan pasar penampungan, pertigaan pasar baru, perempatan Selosari, perempatan Candirejo dan seputaran terminal Maospati. Pengemis dan pengamen yang terpantau dari waktu ke waktu orangnya relatif sama. Bahkan, sebagian justru bukan orang Magetan. Ada yang berasal dari Madiun dan Bojonegoro.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus melakukan upaya dalam mengurangi meningkatnya populasi Gepeng. Penanganan Gepeng dilaksanakan secara terprogram dan berkelanjutan bersama-sama dengan pihak terkait secara lintas fungsi maupun lintas sektoral sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap penanganan masalah gelandangan dan pengemis dilaksanakan secara terprogram, terpadu, dan berkesinambungan. Salah satu langkah penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Pusat adalah dengan mendirikan Panti Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan

secara jelas tentang permasalahan yang dijumpai di Panti Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Madiun. Guna mencapai tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2009), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu merupakan penelitian yang digunakan untuk memperoleh gambaran yang tepat dan utuh tentang suatu gejala. Menurut Bungin (2001) penelitian kualitatif bersifat deskriptif, artinya mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang dilihat dan didengar serta dibacanya; dan peneliti harus membanding-bandingkan, mengkombinasikan, mengabstraksikan dan menarik kesimpulan.

Penelitian ini dilaksanakan di Panti Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis Madiun yang beralamatkan di Kota Madiun. Panti Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para gelandangan dan pengemis.

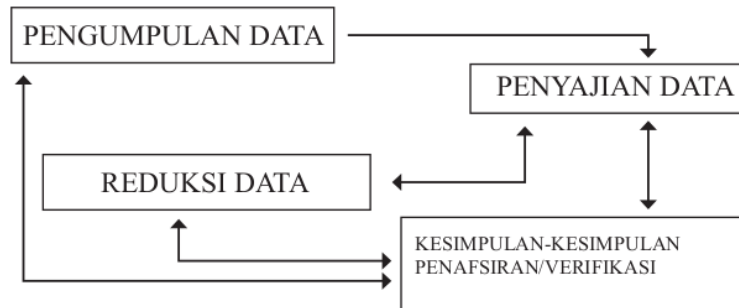
Sampel dalam penelitian ini sebanyak empat orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan individu yang mengalami permasalahan selama menjadi warga binaan. Sesuai dengan karakteristik dan tujuan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Uji validitas dan reliabilitas data

menggunakan teknik triangulasi data. Dengan mendasarkan pada pendapat Sugiyono (2009), analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui 3 alur kegiatan, yaitu (1)

reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan simpulan/verifikasi.

Siklus analisis data model interaktif tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini.



Gambar 1. Siklus Analisis Data Model Interaktif (Sugiyono, 2009)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Warga Binaan UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Kota Madiun

Permasalahan yang terjadi pada warga binaan selama mengikuti rehabilitasi sosial di UPT RSGP relatif beragam. Permasalahan tersebut terkait masalah pribadi, ekonomi, pelanggaran terhadap aturan yang berlaku di RSGP, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, dan kecemburuan terhadap pasangan.

Contoh permasalahan yang pernah ditangani oleh pekerja sosial adalah salah satu warga binaan meninggalkan asrama untuk bekerja namun tidak kembali ke asrama sampai lima hari. Menyikapi hal ini pekerja sosial melakukan pencarian di tempat kerjanya, namun tidak ditemukan. Pekerja sosial juga berusaha mencari yang bersangkutan ke alamat domisili terakhir sesuai dengan data yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Pada saat pendataan, namun ternyata alamat tersebut tidak benar. Akhirnya yang bersangkutan ditemukan oleh petugas di tempat kerjanya pada pencarian

di hari selanjutnya. Berdasarkan riwayat permasalahan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, ternyata yang bersangkutan sudah pernah melakukan kesalahan yang sama sebelumnya. Yang bersangkutan sudah pernah diberikan peringatan secara lisan sebanyak 2 kali namun belum menunjukkan perubahan. Akhirnya pekerja sosial fungsional beserta pembimbing yang ada di UPT RSGP Kota Madiun mengadakan pertemuan untuk membahas permasalahan yang bersangkutan. Dan akhirnya dari pertemuan tersebut, pekerja sosial fungsional dan pembimbing merekomendasikan untuk memberikan sanksi terhadap yang bersangkutan dalam bentuk teguran tertulis yang pertama.

Contoh lainnya adalah terdapat salah satu warga binaan yang berasal dari luar kota Madiun. Yang bersangkutan sudah memasuki usia sekolah namun oleh orang tuanya tidak didaftarkan sekolah karena tidak memiliki surat pindah dan raport dari sekolah asalnya. Sedangkan jika yang bersangkutan akan diproses menjadi siswa kelas 1, Yang bersangkutan tidak memiliki

akta kelahiran yang merupakan syarat pendaftaran masuk ke kelas 1. Selain itu yang bersangkutan dibebani mengasuh 3 orang adiknya yang masih balita karena ibunya sedang hamil anak ke-5. Upaya pemecahan masalah yang dilakukan terhadap masalah ini adalah pekerja sosial dan pembimbing memotivasi dan mengarahkan orang tua yang bersangkutan untuk mengurus surat pindah dan raportnya di kota asalnya atau mengurus akta kelahiran. Berhubung orang tua tidak bersedia mengurus persyaratan sekolah, maka pekerja sosial fungsional dan pembimbing memotivasi orang tua yang bersangkutan agar yang bersangkutan dirujuk ke Panti Asuhan. Namun ternyata orang tua yang bersangkutan keberatan jika dirujuk ke Panti Asuhan dengan alasan tidak ada yang membantu orang tuanya mengasuh adik-adiknya yang masih balita. Kemudian pekerja sosial fungsional dan pembimbing memotivasi orang tua yang bersangkutan untuk memberikan pola asuh yang benar, agar tidak terampas haknya sebagai anak dalam bermain, mendapat kasih sayang dan pendidikan.

Contoh permasalahan ke-3 adalah tentang kasus kecemburuan, kekerasan terhadap pasangan dan pencurian. Permasalahan yang terjadi pada sepasang kekasih yang sama-sama menjadi warga binaan di UPT RSGP. Berdasarkan pengakuan dari pasangannya, yang bersangkutan sering melakukan tindakan kekerasan seperti menendang, memukul dan menyikut tubuh pasangannya sehingga pasangannya merasakan kesakitan.

Pada hari selanjutnya, yang bersangkutan diminta membelikan makanan untuk warga binaan namun ternyata uangnya digunakan untuk membeli *memory handphone*. Di sisi lain, yang bersangkutan merasa cemburu terhadap orang-orang

yang membeli makanan atau minuman di warung tempat pasangannya berjualan. Hal ini menyebabkan pasangannya merasa terganggu ketika berjualan.

Permasalahan juga terjadi pada hari berikutnya, yaitu yang bersangkutan pada jam 04.00 WIB keluar dari asrama tanpa seijin petugas dengan mengambil uang milik pasangannya untuk membeli dagangan di warungnya. Atas kejadian tersebut, pasangan yang bersangkutan menemui pekerja sosial dan pembimbing untuk menyampaikan bahwa tidak ingin melanjutkan rencana untuk ikut pada pernikahan massal karena sering diperlakukan secara kasar oleh yang bersangkutan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, yang bersangkutan dipanggil oleh petugas untuk dilakukan klarifikasi terkait dengan permasalahan yang dilaporkan oleh pasangannya. Akhirnya yang bersangkutan mengakui kesalahannya dan menyatakan keluar dari panti. Terkait dengan rencana permasalahan pernikahannya yang bersangkutan, atas persetujuan kedua belah pihak, memutuskan untuk membatalkan rencana pernikahan karena yang bersangkutan mengundurkan diri dari panti. Ketika yang bersangkutan diminta membuat surat permohonan pembatalan rencana pernikahan massal di Dinas Sosial Kabupaten Madiun, ternyata yang bersangkutan merasa bimbang dan berubah pikiran tetap ingin melanjutkan rencana pernikahannya. Menindaklanjuti hal ini, pekerja sosial dan pembimbing mengadakan pertemuan untuk membahas permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, dilakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan dan pasangannya. Hasil dari pemanggilan tersebut, akhirnya diputuskan bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk melanjutkan hubungan ke pernikahan dengan mengikuti nikah

massal. Persyaratan administratif kedua belah pihak telah siap dan tinggal menunggu pemberitahuan dari Dinas Sosial Kabupaten Madiun.

Berdasarkan keterangan dari pihak panti diperoleh informasi bahwa warga binaan yang telah mengikuti rehabilitasi sosial di UPT RSGP ketika keluar akan diberikan bantuan stimulan untuk bisa memulai usaha baru. Namun berdasarkan pemantauan lanjutan, bantuan stimulan yang seharusnya digunakan untuk membuka usaha tersebut dijual dan lebih memilih untuk kembali menggelandang di jalanan.

Faktor Penyebab Gelandangan dan Pengemis

Keberadaan gelandangan dan pengemis berasal dari berbagai permasalahan hidup yang dihadapi. Beberapa permasalahan yang dialami oleh gelandangan dan pengemis adalah terkait dengan masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah sosial budaya, masalah lingkungan serta masalah hukum dan kewarganegaraan. Masalah ekonomi yang dialami adalah tentang masalah kemiskinan. Para gelandangan dan pengemis berasal dari golongan ekonomi bawah yang berada pada garis kemiskinan. Kebutuhan hidup sehari-hari yang tinggi namun tidak diimbangi dengan penghasilan yang cukup membuat para gelandangan dan pengemis memilih untuk turun ke jalan. Permasalahan ini ditambah dengan masalah pendidikan yang dialami. Tingkat pendidikan yang rendah membuat gepeng mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang mampu mencukupi kebutuhan hidup. Disamping itu, para gelandangan dan pengemis tidak memiliki keterampilan yang dapat digunakan sebagai bekal untuk berwirausaha.

Masalah sosial budaya yang

menghambat para gelandangan dan pengemis untuk maju misalnya karena gepeng tidak mau terikat oleh aturan dan norma. Kehidupan gepeng cenderung bebas sesuai dengan kemauan sendiri. Aktivitas harian dilakukan secara bermalas-malasan dan tidak memiliki disiplin waktu. Misalnya, gepeng bangun tidur ketika hari sudah mulai siang, yaitu lebih dari jam 7 pagi. Kebiasaan seperti ini membuatnya sulit menyesuaikan diri dengan jam kerja yang diberlakukan di tempat kerja, sehingga sulit bagi para gepeng tersebut untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini menyebabkan gepeng menjalani hidup dengan bergantung pada belas kasihan orang lain. Berdasarkan pada kondisi ini dapat dilihat bahwa dengan bergantung hidup pada orang lain, gepeng tidak perlu bersusah payah untuk bekerja namun bisa mendapatkan uang.

Para gelandangan dan pengemis tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Para gelandangan dan pengemis ikut tinggal bersama satu rumah dengan saudaranya dan cenderung berpindah dari satu saudara ke saudara yang lain. Bahkan gepeng ada yang memilih untuk hidup di jalanan karena tidak memiliki rumah. Kondisi seperti ini membuat gepeng tidak memiliki kartu identitas diri, yang membuatnya memiliki masalah hukum dan kewarganegaraan. Dampak lebih jauh dari masalah ini adalah para gepeng akan mengalami kesulitan ketika akan mendaftarkan anaknya ke sekolah, karena tidak memiliki akta kelahiran.

Berbagai masalah yang dialami oleh gepeng terkait dengan kondisi ekonomi, sosial budaya dan tempat tinggal tersebut berdampak tidak baik bagi kondisi fisiknya. Bagi individu gelandangan dan pengemis bisa berdampak pada tingkat kesehatan rendah karena kebersihan lingkungan tempat tinggal yang kurang layak. Selain itu bisa terjadi

kurangnya kecukupan gizi karena makanan yang dikonsumsi cenderung seadanya dan tidak memperhatikan asupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh.

Pembahasan

Fenomena semakin bertambahnya jumlah gelandangan dan pengemis (gepeng) yang ada saat ini merupakan suatu hal yang cukup memprihatinkan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan berkembangnya jumlah gepeng, namun kenyataannya hal ini belum memberikan hasil yang optimal. Pada penelitian ini peneliti mencoba untuk menggali apa yang menyebabkan beberapa upaya yang telah dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, ada beberapa hal yang peneliti temukan terkait dengan permasalahan yang dialami oleh warga binaan yang ada di UPT RSGP Madiun. Permasalahan tersebut terkait dengan faktor penyebab beberapa warga binaan yang lebih memilih untuk kembali menjadi gelandangan dan pengemis meskipun telah mengikuti program pendampingan.

Pada kasus pertama peneliti menemukan bahwa yang melatarbelakangi warga binaan meninggalkan asrama adalah karena faktor internal. Salah satu faktor internal yang menjadi penyebabnya adalah sikap mental dari warga binaan. Hal ini murni berasal dari individu masing-masing dimana sifat malas mendominasi dalam pribadinya sehingga hanya mampu berpikir secara sederhana agar terhindar dari sikap berusaha dan mengambil jalan mudah untuk menghasilkan uang. Warga binaan malas mengikuti program pendampingan yang diarahkan pada pemberian berbagai ketrampilan dan keahlian sebagai bekal untuk bisa kembali ke masyarakat, Sikap malas mengikuti berbagai macam program

tersebut yang membuat warga binaan meninggalkan asrama dan tidak kembali lagi ke asrama. Selain itu tingkat pendidikan warga binaan juga memberikan kontribusi yang melatarbelakangi terjadinya kasus pertama. Rendahnya tingkat pendidikan berpengaruh pada pola pikir yang dimilikinya. Pola berpikirnya adalah tentang bagaimana caranya mendapatkan uang yang banyak dengan mudah. Jalan satu-satunya yang bisa dipikirkan untuk bertahan hidup adalah dengan cara meminta-minta (mengemis).

Pada kasus kedua peneliti juga menemukan adanya pengaruh faktor internal dan eksternal yang melatarbelakangi munculnya masalah yang dialami oleh warga binaan. Salah seorang warga binaan yang berasal dari luar kota dan memiliki anak usia sekolah namun tidak bersedia untuk menyekolahkan anaknya dengan alasan jika anak tersebut sekolah maka tidak akan ada yang membantunya untuk menjaga adik-adiknya. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola asuh orang tua terhadap anak. Bagi warga binaan tersebut yang tidak memahami tentang pentingnya pendidikan bagi anak, menganggap bahwa hal tersebut adalah masalah biasa, yang terpenting adalah bagaimana caranya mampu bertahan hidup dan mendapatkan uang untuk makan sehari-hari. Diantara warga binaan juga ada yang memanfaatkan anak-anaknya untuk mencari uang guna menarik simpati dari para pejalan kaki atau pengendara motor yang ada di jalan. Sikap mental malas dan pola pikir sederhana tersebut yang membuat warga binaan ini sulit untuk keluar dari pekerjaannya meminta-minta dan lebih memilih hidup menggelandang di jalanan.

Sedangkan kasus ketiga yang dialami oleh warga binaan adalah kasus kekerasan dan pencurian yang dialami oleh sepasang kekasih yang mengikuti program

pendampingan di UPT RSGP Madiun. Selama di asrama pasangan kekasih ini sering terlibat pertengkaran karena rasa saling cemburu. Selain itu salah satu pasangan mengambil uang pasangannya dan digunakan untuk membeli *memory handphone*. Kasus tersebut terkait dengan masalah sikap mental dari warga binaan. Sikap mental malas berusaha dalam mewujudkan keinginan dan cara berpikir instan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan ini menjadi pemicu munculnya tindak pencurian. Kasus pencurian ternyata tidak hanya dilakukan kepada orang asing yang tidak dikenal, namun dilakukan juga kepada orang terdekatnya. Selain masalah pencurian, pada kasus ke tiga ini juga terjadi tindak kekerasan yang dilakukan kepada orang terdekat. Kejadian seperti itu dapat dihindari jika individu yang bersangkutan memiliki sikap mental yang positif, yaitu sikap mampu melakukan komunikasi dengan baik dalam menyampaikan kondisi emosi negatif yang dialami.

Terkait dengan permasalahan gelandangan dan pengemis yang jumlahnya terus meningkat, pemerintah melalui Dinas Sosial telah melakukan upaya dengan mendirikan Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis. Keberadaan UPT RSGP di wilayah Jawa Timur terdapat di Pasuruan dan Madiun. UPT RSGP berwenang untuk melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada penyandang masalah sosial gelandangan, pengemis dan orang terlantar. Di UPT RSGP ini terdapat program pendampingan diarahkan pada pemberian berbagai ketrampilan dan keahlian kepada warga binaan sebagai bekal untuk bisa kembali ke masyarakat. Harapannya dengan bekal ketrampilan ini warga binaan bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan hidup lebih baik.

Namun seperti yang telah dibahas

sebelumnya, program ini kurang bisa berjalan maksimal. Pada penelitian ini peneliti mencoba untuk melihat lebih dalam mengapa program pendampingan tersebut kurang bisa berjalan dengan maksimal. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti menyimpulkan bahwa faktor penyebab para gelandangan dan pengemis memilih untuk hidup di jalanan bukan saja karena kurangnya bekal ketrampilan dan pendidikan, namun ada penyebab lain diantaranya adalah adanya sikap malas, tidak mau berusaha untuk mengubah hidup menjadi lebih baik dan menginginkan hidup enak dengan cara yang instan.

Jika sumber masalahnya adalah karena adanya sikap malas, tidak mau berusaha serta menginginkan hidup enak dengan cara instan, pembinaan dan pendampingan yang menekankan pada pemberian berbagai keahlian dan ketrampilan kerja masih kurang optimal untuk mengentaskan permasalahan keberadaan gelandangan dan pengemis. Sikap malas dan tidak mau berusaha merupakan ciri mental yang tidak sehat. Seseorang yang memiliki mental yang sehat ditandai dengan adanya keinginan atau motivasi yang kuat untuk meraih kualitas diri yang lebih baik dalam setiap aspek kehidupannya. Jika seseorang sudah tidak memiliki motivasi untuk meraih hidup yang lebih baik, maka individu tersebut mengalami gangguan kesehatan mental.

Dampak yang ditimbulkan akibat ketidakmauan gelandangan dan pengemis untuk mengikuti aturan dan norma yang berlaku di masyarakat diantaranya adalah gepeng akan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini bisa berakibat pada tingkat penghasilan yang rendah dan tidak menentu. Hidup gepeng yang cenderung bebas, tidak disiplin waktu dan semaunya sendiri membuat mentalitasnya

menjadi semakin buruk. Gelandangan dan Pengemis merasa nyaman hidup dengan cara bergantung dari belas kasihan orang lain. Kebiasaan hidup malas terus menerus dilakukan dan ditiru oleh anak-anaknya. Ketika terkena beban ekonomi yang relatif berat, misalnya ketika anaknya mulai masuk sekolah maka gepeng membutuhkan biaya pendidikan. Ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan hidup bisa mendorongnya untuk melakukan tindakan pelanggaran hukum seperti mencuri, merampok dan mencopet. Dampak lebih luas yang turut dirasakan oleh masyarakat terkait dengan keberadaan gelandangan dan pengemis adalah adanya gangguan keamanan, kebersihan dan keindahan serta dapat merusak citra pemerintah/negara.

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti melihat bahwa sumber permasalahan yang terjadi adalah karena sikap mental yang kurang sehat, yaitu pada kurangnya motivasi untuk berusaha. Latar belakang pendidikan yang rendah membuat para gelandangan dan pengemis mengalami kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan yang memadai guna mencukupi kebutuhan hidup. Selain itu, faktor kemiskinan merupakan masalah yang melatarbelakangi pada gelandangan dan pengemis sulit untuk keluar dari hidup menggelandang di jalanan. Di lapangan ditemukan fakta para eks-warga binaan yang terus menerus masuk dari satu panti rehabilitasi ke panti rehabilitasi yang lain. Hal ini dilakukan karena para gelandangan dan pengemis beranggapan bahwa dengan hidup di panti rehabilitasi, bisa mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan hidup, seperti bantuan makan dan tempat tinggal. Fakta tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2003) yang menyebutkan hasil 81% alasan

seseorang menjadi gepeng adalah disebabkan oleh faktor sosial ekonomi. Pada penelitian serupa, Sugiharto (2009) menjelaskan faktor yang mempengaruhi individu turun ke jalan atau menggelandang adalah adanya masalah kemiskinan yang dialami oleh anak jalanan dan keluarganya. Di sisi lain juga adanya struktur sosial dalam masyarakat, yang menyebabkan terjadinya differensiasi sosial sebagai dampak adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat. Di samping struktur sosial, peubah lain yang turut berpengaruh terhadap perilaku anak jalanan adalah adanya perubahan sosial dalam masyarakat. Peubah lain yang juga berpengaruh adalah tidak adanya penghargaan sosial (*social rewards*) atau tidak adanya pengakuan sosial (*social recognition*) yang mengakui eksistensi, harkat dan martabat anak jalanan/gepeng sebagai manusia, baik dari pihak keluarga maupun lingkungan, karena walaupun mereka sering dinilai negatif tetap ada sisi-sisi positif.

Para warga binaan perlu mendapatkan bantuan yang lebih spesifik berkaitan dengan aspek psikologisnya. Karena disini yang menjadi sumber masalahnya adalah mental dari warga binaan oleh sebab itu perlu untuk diberikan bantuan guna membangun sikap mental yang sehat. Dengan memiliki mental yang sehat para gelandangan dan pengemis akan lebih memiliki motivasi dan tujuan dalam hidup. Waluyo (2002) di dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa bimbingan mental sebagai fokus utama program rehabilitasi di Panti Sosial, metodenya masih perlu dikaji ulang. Teknik bimbingan mental yang diterapkan lebih mengacu pada aspek transfer pengetahuan, bukan aspek penyadaran mental. Dimana semua klien dari berbagai tingkat pendidikan masuk dalam satu kelas dan diajarkan materi yang sama, sehingga situasinya lebih menyerupai sekolah formal. Bimbingan mental untuk membangun

konsep diri yang positif, percaya diri, dan penghargaan diri diperlukan pendekatan individu, tehnik konseling yang efektif dan sebagainya. Program rehabilitasi gepeng harus dilaksanakan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Lebih lanjut Waluyo (2002) melaporkan dari hasil penelitian ditemukan, bahwa sebagian klien Panti Sosial menggelandang lagi. Banyak aspek sebagai penyebabnya, diantaranya Panti Sosial tidak memiliki dana untuk mendukung usaha kerja gepeng, kesempatan bekerja disektor formal sangat sulit, ketrampilan kerja yang diajarkan sangat minim, umumnya dibawah standar pasaran kerja, dan metoda bimbingan mental dan sosial juga kurang tepat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa permasalahan yang dialami oleh gelandangan dan pengemis di Panti Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis, permasalahan tersebut terkit dengan:

1. Masalah ekonomi,
2. Masalah pendidikan,
3. Masalah sosial budaya,
4. Masalah lingkungan
5. Masalah hukum dan kewarganegaraan.
6. Sikap Mental yang kurang sehat

Sedangkan faktor penyebab para gelandangan dan pengemis memilih untuk hidup di jalanan bukan saja karena kurangnya bekal ketrampilan dan pendidikan yang memadai, namun ada penyebab lain diantaranya adalah adanya sikap malas, tidak mau berusaha untuk mengubah hidup menjadi lebih baik dan menginginkan hidup enak dengan cara yang instan.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, jika sumber masalahnya adalah karena adanya sikap malas, tidak mau berusaha serta menginginkan hidup enak dengan cara instan, pembinaan dan pendampingan yang menekankan pada pemberian berbagai keahlian dan ketrampilan kerja masih kurang optimal untuk mengentaskan permasalahan keberadaan gelandangan dan pengemis. Sikap malas dan tidak mau berusaha merupakan ciri mental yang tidak sehat. Seseorang yang memiliki mental yang sehat ditandai dengan adanya keinginan atau motivasi yang kuat untuk meraih kualitas diri yang lebih baik dalam setiap aspek kehidupannya. Jika seseorang sudah tidak memiliki motivasi untuk meraih hidup yang lebih baik, maka individu tersebut mengalami gangguan kesehatan mental. Pendampingan psikologis yang dilakukan oleh seorang profesional yang memiliki latar belakang ilmu psikologi dan bimbingan konseling diperlukan guna membantu para gelandangan dan pengemis untuk menumbuhkan sikap mental yang sehat sehingga dapat menjadi individu yang produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya : Universitas Airlangga
- Dituneik. (2014, Januari 31). *Kota Razia Gepeng, Kabupaten Razia APK*. Diunduh dari <https://dituneik.wordpress.com/2014/01/31/kota-razia-gepeng-kabupaten-razia-apk/> tanggal 3 Februari 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980. Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis. Diunduh dari <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl37609/node/3107> tanggal 21 November 2013.
- Radarmadiunweb. (2014, Juni 19). *Beri Recehan Kena Denda Rp 50 Juta*. Diunduh dari <http://www.radarmadiun.info/blog/2014/06/beri-recehan-kena-denda-rp-50-juta/> tanggal 31 Juni 2014.
- Siregar, N. 2003. Analisis Sosial Ekonomi Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Tesis* (tidak dipublikasikan). Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Sugiharto, S.T. (2009). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Anak Jalanan di Bandung, Bogor dan Jakarta*. Diunduh dari www.kemensos.go.id tanggal 31 Juni 2014.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Taufiq, R. (2005, Desember 26). *Pengamen Madiun Minta Rekomendasi Bisa Ngamen Lagi*. Diunduh dari <https://nasional.tempo.co/read/news/2005/12/26/05871225/pengamen-madiun-minta-rekomendasi-bisa-ngamen-lagi> tanggal 21 November 2013.
- Tira. (2012). *Gelandangan dan Pengemis Isu Permasalahan Sosial*. Diunduh dari <https://rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1496> tanggal 21 November 2013.
- Wakoranews.com. (2010, Mei 2). *Pemkot Madiun Siap Tekan Gepeng*. Diunduh dari <http://wakoranews.blogspot.co.id/2010/05/pemkot-madiun-siap-tekan-gepeng.html> tanggal 3 April 2014.
- Waluyo, S. (2002). *Proses rehabilitasi sosial gelandangandanpengemis: Studi kasus di Panti Sosial Bina Karya "Pangudi Luhur" Bekasi* (Tesis Perpustakaan Universitas Indonesia. Diunduh dari <http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=72911&lokasi=lokal> tanggal 21 November 2013.
- Wismoyojati, B. A. (2012, Oktober 17). *Peningkatan Gepeng Di Indonesia*. Diunduh dari <http://bayuagungwismoyo.blogspot.co.id/2012/10/peningkatan-gepeng-di-indonesia.html> tanggal 21 November 2013.

jurnal Inquiry- Identifikasi Gelandangan dan Pengemis

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

7%

★ Submitted to Program Pascasarjana Universitas
Negeri Yogyakarta

Student Paper

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 35 words